

BOKS

RINGKASAN EKSEKUTIF PENELITIAN JALUR DISTRIBUSI KOMODITAS PENYUMBANG TERBESAR INFLASI DI KOTA SEMARANG, PURWOKERTO DAN TEGAL

Stabilitas perekonomian merupakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh hampir semua negara. Kestabilan ekonomi mencakup kestabilan sisi moneter dan fiskal. Salah satu unsur penting dalam memelihara kestabilan ekonomi adalah kestabilan harga. Stabilitas harga diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif di bidang produksi maupun investasi. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila laju inflasi dapat dikendalikan. Terjadinya inflasi secara teori dapat dilihat dari aspek permintaan (*demand pull inflation*) maupun penawaran (*cost push inflation*). Mencermati potensi inflasi dari sisi penawaran, tidak saja masalah jumlah persediaan barang/jasa, namun juga perilaku distribusi barang/jasa tersebut. Nilai tambah yang tinggi sangat terkait dengan perilaku dan jalur distribusi dari suatu komoditas dan atau kebijakan. Oleh karena itu mencermati inflasi, tidak cukup dari satu model pengamatan pasar uang/permintaan, namun juga aspek penawaran barang dan jalur distribusinya.

Terkait dengan jalur distribusi ini, karakteristik produk sangat menentukan panjang pendeknya rantai distribusi yang harus dilewati oleh sebuah komoditas. Secara umum sistem perusahaan pada tiap komoditas yang memiliki rantai distribusi 3 tingkat melewati distributor besar pada rantai distribusinya, sehingga dari distributor pasar langsung terkait dengan produsen. Hal ini sangat dimungkinkan antara lain karena untuk memperpendek jalur pendistribusian terutama untuk komoditas yang tidak tahan lama. Komoditas yang sama pada tiga kota, belum tentu memiliki rantai jalur distribusi yang sama, hal ini terjadi karena selain karakteristik produk, karakteristik dan perilaku pembelian konsumen juga sangat berpengaruh dalam pembentukan rantai distribusi.

Dalam perjalanannya melalui jalur distribusi tersebut, sebuah komoditas mengalami perubahan harga sebagai bentuk penetapan margin laba oleh pelaku dalam jalur distribusi. Tidak terdapat pola yang menunjukkan dimana margin laba yang besar/signifikan terjadi, tetapi margin laba bervariasi menurut komoditas dan pihak dalam jalur distribusi. Oleh karena struktur pasar komoditas terpilih cenderung berbentuk pasar persaingan sempurna, maka perubahan harga sangat ditentukan oleh

mekanisme pasar (tergantung kepada permintaan dan penawaran atas sebuah komoditas). Dari sisi permintaan, perubahan harga ditentukan oleh faktor musiman (seperti lebaran) atau daya beli (penghasilan). Sedangkan dari sisi penawaran, perubahan harga dicerminkan dari stok komoditas di pasar yang antara lain dipengaruhi oleh kegagalan panen, naiknya harga bahan baku atau BBM. Atas dasar kondisi ini, perubahan harga yang menimbulkan inflasi lebih banyak bersifat *cost push inflation*.

Berkaitan dengan struktur pasar pada berbagai komoditi terpilih di tiga kota, dipersepsikan baik oleh responden konsumen maupun pedagang bahwa pada berbagai komoditas tersebut terjadi pasar persaingan sempurna sehingga banyak terdapat penjual maupun pembeli, khususnya pada responden warung/kios dan pedagang pasar. Sedangkan untuk pedagang besar dan produsen, meskipun tidak sebanyak jumlah warung dominasi atau monopoli terhadap satu komoditas tertentu hanya terjadi pada dua komoditas saja yaitu gula pasir dan beras.

Kebijakan terkait pengendalian harga yang dilakukan pemerintah antara lain kebijakan subsidi, operasi pasar dan kebijakan makro. Selain kebijakan tersebut, upaya pengendalian harga juga dilakukan melalui pendekatan penelusuran jalur distribusi, misalnya pernah dilakukan untuk komoditas minyak goreng. Dalam pendekatan melalui penelusuran jalur distribusi tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan proses pembentukan harga, terutama yang sangat dominan dalam pembentukan harga dikumpulkan dan diberi pengarahan untuk ikut ambil bagian dalam upaya pengendalian harga. Meskipun masih bersifat himbauan dan pembinaan distributor, namun demikian langkah ini diharapkan menumbuhkan rasa empati dari para agen untuk ikut serta dalam pengendalian harga dan tidak justru berspekulasi. Di Kota purwokerto, khusus untuk komoditas minyak tanah telah dibentuk tim khusus ditingkat pengecer pada dinas energi dimana disperindag juga bergabung dalam tim tersebut.

Rekomendasi

Secara umum, pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga, baik secara langsung dengan operasi pasar maupun secara tidak langsung dengan subsidi maupun pembinaan terhadap pelaku pasar, baik yang bersifat antisipatif maupun penanggulangan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam persepsi masyarakat yang terwakili oleh pernyataan responden, kebijakan-kebijakan tersebut kurang ditangkap (dipersepsikan belum ada upaya). Atas dasar hal tersebut nampaknya pemerintah perlu lebih mensosialisasikan program

pengendalian harga kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian diharapkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian harga lebih tinggi.

Fluktuasi harga pada kelompok pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor musim dalam arti luas, musim dalam arti fenomena sosial maupun fenomena alam. Apabila fluktuasi harga disebabkan karena fenomena sosial, maka harga dibentuk oleh permintaan dan penawaran, sehingga ketika musim telah lewat maka harga akan segera menyesuaikan diri dengan sendirinya. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu terlalu banyak intervensi dalam jalur distribusi. Selain karena fluktuasi harga bersifat musiman, jalur distribusi pada komoditas-komoditas tersebut relatif pendek dan tidak ada dominasi. Namun demikian, untuk komoditas beras yang memiliki permintaan cenderung inelastis dan sangat strategis, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu pembinaan kepada distributor dapat lebih diintensifkan sehingga diharapkan mampu menekan dorongan spekulatif pada saat-saat tertentu. Pemantauan harga terhadap komoditas tersebut juga dapat menjadi dasar kebijakan antisipatif akan terjadinya gejolak harga. Upaya pengendalian komoditas-komoditas pertanian juga perlu didukung oleh pengaturan tata niaga dan/atau harga komoditas-komoditas pendukung pertanian, misalnya pupuk. Untuk menjaga ketersediaan beras sudah ada pengaturan tidak diperkenankan mengekspor beras 2 bulan sebelum panen dan 2 bulan setelah panen. Untuk beras juga ditetapkan harga dasarnya dengan instruksi Presiden. Kebijakan tersebut dapat terus dipertahankan.

Jalur distribusi pada komoditas-komoditas peternakan cenderung panjang, namun demikian dalam komoditas ini cenderung tidak ada dominasi. Jalur distribusi yang panjang atau pendek pada dasarnya merupakan pilihan pelaku (produsen ataupun pedagang) dan sangat tergantung pada karakter produk. Dalam hal ini pemerintah dapat berperan dalam menjaga kontinuitas pasokan serta memperlancar arus distribusi komoditas sehingga harga menjadi stabil.

Komoditas minyak goreng memiliki jalur distribusi panjang, yakni dari produsen-supplier utama-pedagang pasar/distributor-warung-konsumen. Selain itu, struktur pasar untuk komoditas ini cenderung oligopolis. Pembinaan terhadap para distributor dan mengikut sertakan mereka dalam upaya pengendalian harga, merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Seperti halnya komoditas peternakan, pemerintah dapat berperan dalam menjaga kontinuitas pasokan serta memperlancar arus distribusi komoditas sehingga harga menjadi stabil.

Gula pasir termasuk komoditas dengan distribusi yang panjang. Dalam tata niaga gula di Jawa Tengah terdapat unsur dominasi. Hal tersebut disebabkan karena dalam pemasaran gula menggunakan sistem lelang oleh PTP IX. Pengaturan tata niaga gula terkait dengan alokasi gula lokal dan impor. Gula rafinasi tidak boleh masuk pasar

karena hanya untuk keperluan farmasi, karena memiliki pengaruh terhadap gula petani. Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian harga, dapat dilakukan dengan terus memantau alokasi distribusi gula pasir di masyarakat.

Tata niaga minyak tanah pada dasarnya sudah baku. Namun demikian, sebagai akibat dari beberapa kebijakan lain seperti konversi dari minyak tanah ke gas yang menyebabkan Pertamina mengurangi kuota pasokan di pasar telah menyebabkan kelangkaan minyak tanah di pasar. Karena masyarakat cenderung belum siap dengan program konversi tersebut, maka permintaan tetap tinggi. Hal tersebut yang mendorong harga minyak tanah dan harga naik. Selain itu, dalam prakteknya juga terjadi penyimpangan jalur distribusi, yakni dari agen langsung ke konsumen industri sehingga minyak tanah untuk keperluan rumah tangga berkurang. Dalam hal ini, pemerintah perlu menindak tegas penyimpangan-penyimpangan tersebut

(Penelitian dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang, bekerjasama dengan P3M Fakultas Ekonomi UNIKA Soegijapranata Semarang, Oktober-Desember 2008)

